

TAJUK RENCANA

Mempertanyakan Kenaikan Harga Bawang Putih

ADA apa dengan harga bawang putih? Pertanyaan kritis ini perlu diajukan menyusul melambungnya harga bawang putih di pasaran. Kenaikan harga komoditas pangan ini hampir merata di seluruh Indonesia, termasuk di DIY. Bahkan, kenaikan mulai terasa menjelang bulan Ramadan. Di pasar tradisional DIY, harga bawang putih sudah menyentuh angka Rp 60 ribu perkilogram di tingkat konsumen. Dikhawatirkan harga makin tak terkendali menjelang Idul Fitri nanti.

Terkait kondisi tersebut, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan perlunya digelar operasi pasar (OP). Bahkan, katanya, OP ini merupakan perintah Presiden Jokowi dalam rapat terbatas untuk menekan lonjakan harga bawang putih yang sudah terlalu tinggi. Pemerintah mematok harga tertinggi di tingkat konsumen Rp 30 ribu perkilogram.

Kenaikan harga bawang putih di pasaran tentu menimbulkan tanda tanya besar. Sebab, ketersediaan barang atau stok di pasaran sebenarnya sudah mencukupi. Namun, nyatanya di lapangan, barang langka, sementara permintaan meningkat. Adakah yang keliru dengan sistem distribusi komoditas bawang putih yang kebanyakan didatangkan dari Tiongkok ini? Wajar bila pertanyaan ini lebih ditanyakan kepada para importir yang selama ini memasok barang di pasaran. Mereka harus dimintai pertanggungjawaban mengapa harga bawang putih impor ini bisa melambung tak terkendali. Para importir mestinya tidak hanya bertanggung jawab atas ketersediaan barang di pasaran, melainkan juga menjaga agar harga stabil, tidak

melambung.

Kita akui, operasi pasar yang digulirkan pemerintah saat ini bersifat sementara atau sesaat. Meski operasi itu digelar selama Ramadan, belumlah menyelesaikan akar persoalan. Tak kalah penting adalah mencari penyebab melambungnya harga bawang putih. Kita khawatir bila ada mata rantai distribusi yang dimainkan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab sehingga berakibat melambungnya harga.

Wajar pula bila pemerintah meminta kepada para importir untuk mengupayakan agar harga bawang putih bisa turun menjadi Rp 25 ribu perkilogram. Kalau mau jujur, para importir inilah yang paling tahu mengapa terjadi gejolak harga di pasaran. Kita yakin ada spekulasi yang bermain di tengah mahalnya harga bawang putih. Karena itu, kita berharap, ancaman Menteri Pertanian yang akan menerjunkan Satgas bersama Polri untuk memantau harga di lapangan, bukan sekadar gertak sambal.

Yang dibutuhkan adalah aksi konkret, misalnya bagaimana seandainya Satgas menemukan pedagang yang menjual harga di atas patokan atau di atas Rp 30 ribu perkilogram. Memang tak serta merta mereka dikenai sanksi, melainkan harus dilacak mengapa hal itu bisa terjadi. Bila kemudian ditemukan ada importir nakal, di situlah butuh ketegasan Satgas untuk menindaknya. Kalau ditemukan kecurangan, bukan tidak mungkin pemerintah mencabut izin impor. Kita tidak menutup mata, berdasar pengalaman masa lalu, izin impor sering disalahgunakan, bahkan menjadi ladang empuk terjadinya suap menyup. □ - c

Otoritarianisme Elite Lokal

Riza Multazam Luthfy

tradisional bergerak menuju corak yang rasional. Kepercayaan tidak lagi disandarkan pada ketokohan, melainkan pada rasionalitas. Berkembangnya pemikiran manusia menjadikan mitos seolah 'barang rongsokan'.

Padahal, pemikiran manusia sejak lama dikendalikan oleh mitos-mitos kuno yang diwariskan lintas generasi. Betapa corak pandang manusia sering diwarnai dengan beberapa mitos yang bertebaran di kalangan



KR-JOKO SANTOSO

an masyarakat. Peralihan zaman menyebabkan mitos pada akhirnya tersungkur di hadapan etos dan sarana modern.

Hak Konstitusional

Otoritarianisme di level lokal antara lain semakin melembaga seiring dengan munculnya perilaku egois-individual kepala desa. Perasaan selaku 'orang terpilih' cenderung memicu seseorang untuk berbuat dan bertindak semena-mena. Kaum elite lokal barangkali abai bahwa segala bentuk kesewenangan turut mengorbankan hak konstitusional warga negara. Dalam suasana dan iklim demokratis, tentu sikap demikian menciderai Pasal 28D Undang-Undang Dasar 1945.

Sebaliknya, sikap menghormati pilihan orang lain merupakan bagian dari ikhtiar meneguhkan fondasi kehidupan bermasya-

rakat, berbangsa, dan bernegara. Sikap menghargai perbedaan antarwarga menjadi hal yang tak terpisahkan dari proses pendewasaan diri.

Penyelenggaraan pemilu dengan memegang teguh prinsip kebersamaan sekaligus menghindari bermacam perilaku intoleran merupakan implementasi nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika yang akarnya telah ditancapkan para bapak bangsa puluhan tahun silam. Bagaimanapun, kebebasan warga negara dalam menjatuhkan pilihan, baik pada presiden maupun anggota legislatif, merupakan salah satu indikator terwujudnya pesta demokrasi yang adil, jujur dan bersih.

Atas dasar itulah, kepala desa seharusnya mampu menempatkan diri sebagaimana ketentuan yang genap digariskan dalam peraturan perundang-undangan. Menurut fakta sejarah, kedudukan kepala desa dari masa ke masa senantiasa mengalami perubahan. Berbeda dengan UU 5/1979 yang mendudukan kepala desa selaku aktor sentral, peraturan perundang-undangan yang mengatur desa setelahnya meletakkan pemimpin lokal tersebut dalam posisi yang lebih proporsional.

Setelah reformasi, kekuasaan lokal tidak lagi dipusatkan pada jabatan kepala desa. Jika pada UU 22/1999 dan UU 32/2004 kepala desa harus berbagi kekuasaan dengan Badan Perwakilan Desa (BPD) dan Badan Permusyawaratan Desa (Bamudes), maka pada UU 6/2014 jabatan kepala desa berada dalam mekanisme *check and balances*. Berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang desa terbaru tersebut, Musyawarah Desa (Musdes) menjadi forum tertinggi di tingkat lokal yang harus senantiasa dimuliakan oleh semua pihak. □ - c

Riza Multazam Luthfy,
peneliti desa, Mahasiswa Program
Doktor Ilmu Hukum UII Yogyakarta.

Syarat Menulis Opini

Para penulis yang terhormat, Redaksi hanya akan memperhatikan tulisan artikel/opini yang dikirim ke opinikr@gmail.com dengan disertai CV dan copy identitas diri. Panjang tulisan sekitar 3.700 karakter atau 600 kata. Demi kelancaran bersama, tidak melayani pengiriman ke akun pribadi. Terimakasih

Pikiran Pembaca



Pikiran Pembaca terbuka bagi siapa saja. Naskah dikirim ke kantor Redaksi Kedaulatan Rakyat, Jalan Margo Utomo (P Mangkubumi) 40-42, Yogyakarta 55232 Fax (0274) 563125 Telp (0274) 565685 (Hunting) atau melalui email pikiranpembaca@gmail.com. Naskah dilengkapi fotokopi atau scan identitas diri berikut nomor telepon yang bisa dihubungi. Isi tanggung jawab penulis.

Warning Global Warming

PENCEMARAN terhadap lingkungan hidup yang sejatinya berasal dari manusia sendiri telah mencemari air, tanah, dan udara. Fenomena ini kita kenal sebagai fenomena pemanasan global. Pemanasan global (global warming) adalah suatu bentuk ketidakseimbangan ekosistem di bumi akibat terjadinya proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan di bumi.

Gas rumah kaca mampu menyerap panas dari sinar matahari sehingga panas dari sinar matahari akan tertahan di bumi dan menyebabkan suhu bumi menjadi meningkat. Gas ini dapat ditimbulkan dari aktivitas manusia seperti gas buang kendaraan bermotor, pabrik, pembakaran sampah, pembakaran hutan, dan sebagainya. Peningkatan suhu bumi tersebut menimbulkan menciutnya es di kutub dan meningkatnya volume air laut. Meningkatnya gas rumah kaca terutama dalam industri dan kendaraan bermotor menyebabkan polusi berupa asap racun. Sebagai hasilnya, konsentrasi gas rumah kaca berupa buangan CO2 saat ini telah jauh di atas ambang batas alami yang berlangsung selama kurang lebih 650.000 tahun belakangan (Sulistiyono, 2007).

Saat ini planet bumi tengah berada di tengah krisis perubahan iklim pada tingkat yang sangat mengkhawatirkan, sehingga dibutuhkan tindakan-tindakan drastis untuk mengembalikan keadaan. Suhu global meningkat dua kali lebih cepat dalam kurun waktu 50 tahun terakhir sejak akhir abad yang lampau dan diperkirakan akan meningkat dengan lebih cepat pada dekade-dekade yang akan datang (Sulistiyono, 2007).

Mengingat semakin parahnya kondisi bumi akibat global warming tersebut, kebutuhan akan adanya hutan sebagai penyangga sistem kehidupan dan pengatur suhu bumi semakin meningkat bahkan mutlak dibutuhkan. Tentunya masyarakat Indonesia dan masyarakat dunia gencar menggalangan kegiatan menanam dan melestarikan hutan. Keadaan seperti itu mendorong warga seluruh dunia bersatu untuk melindungi dan melestarikan hutan. Namun upaya melestarikan hutan tidak semudah mengembalikan

tangan, perlu kesadaran dan kerja keras seluruh warga dunia untuk ikut andil dalam melestarikannya.

Selama ini pemerintah telah melakukan banyak cara yang dikembangkan untuk mengurangi dampak global warming, salah satunya adalah REDD (Reducing Emission from Deforestation and forest Degradation) atau pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan. REDD sebenarnya mekanisme internasional yang dimaksudkan untuk memberi insentif yang bersifat positif bagi negara berkembang yang berhasil mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan.

Deforestasi adalah perubahan secara permanen dari area berhutan menjadi tidak berhutan yang diakibatkan oleh kegiatan manusia. Sedangkan degradasi hutan adalah penurunan kuantitas tutupan hutan dan stok karbon selama periode tertentu yang diakibatkan oleh kegiatan manusia. Adanya deforestasi dan degradasi hutan ini semuanya tak lepas dari kegiatan manusia. Manusia yang melakukan kerusakan, namun akibatnya menyeluruh ke seluruh dunia termasuk makhluk hidup (hewan dan tumbuhan) yang tak bersalah.

Upaya-upaya lain yang dapat dilakukan untuk melestarikan hutan dalam menanggulangi global warming adalah dengan reboisasi, menerapkan sistem tebang pilih dan tebang tanam, melakukan penanaman secara konservatif, memberikan sanksi bagi penambang sembarangan, tidak membuang sampah sembarangan di hutan, melindungi dan menjaga habitat yang ada di hutan, mengurangi penggunaan kertas berlebih, dan sebagainya.

Dengan pelestarian hutan secara efektif, kemungkinan besar hutan yang berfungsi sebagai sistem penyangga kehidupan dan pengatur keseimbangan ekosistem dan suhu di permukaan bumi dapat terlaksana baik dan berjalan normal, sehingga mampu mengurangi dan menurunkan tingkat global warming yang semakin parah ini. □ - c

Anisa Hanan Qonita
Pendidikan Geografi FIS UNY.

Demokrasi Post-truth

Bambang Arianto

MENARIK membaca Tajuk Rencana Harian Kedaulatan Rakyat (20/4) yang memaparkan bahwa persebaran hoax pascapemilu 2019 justru kian meningkat. Bahkan Menkominfo Rudiantara menyebutkan jika pada Agustus 2018 hoax mencapai 25 temuan, tapi dalam periode Januari-Maret 2018 temuan kian berlipat yakni mencapai 430. Sedangkan, pascapencoblosan 17 April 2019, hoax yang beredar sudah tidak terhitung lagi. Derasnya tsunami hoax tersebut membuat kebenaran objektif dikalahkan dengan kebenaran emosional. Mencuatnya kebenaran emosional inilah yang menjadi pertanda menguatnya demokrasi *post-truth*.

Bila ditelisik, istilah *post-truth* (penyangkalan kebenaran) menurut Kamus Oxford digunakan pertama kali tahun 1992. Kala itu Steve Tesich, penulis esai pada harian *The Nation* yang menunjukkan kegelisahannya terhadap perilaku politisi yang dengan sengaja memainkan opini publik dengan mengesampingkan dan mendegradasi fakta informasi yang objektif. Sedangkan studi Ralph Keyes dalam bukunya *The Post-truth Era* (2004) dan Stephen Colber mempopulerkan istilah *post-truth* sebagai *truthiness* yang kurang lebih sebagai sesuatu yang seolah-olah benar, meski tidak benar sama sekali.

Berpengaruh

Era demokrasi *post-truth* akan membuat fakta tidak lagi terlalu berpengaruh dalam membentuk opini publik. Akan tetapi emosi dan keyakinan personal yang lebih dominan dalam membentuk informasi. Hal itu bisa dilacak dalam gelaran kampanye politik 2019 hingga pascapencoblosan. Fakta dan kebenaran objektif selalu berusaha ditutupi dengan berita hoax. Informasi yang disampaikan sengaja dikembangkan dengan tujuan untuk mengolah sentimen masyarakat. Bagi yang kurang mengenyam literasi tentu akan dengan mudah sekali terpengaruh oleh informasi tersebut yang nyatanya adalah hoax.

Sebut saja kasus *quick count* (hitung cepat) yang menempatkan pasangan Joko Widodo-Ma'rif Amin telah membuat keterbelahan di aras publik. Dikarenakan publik larut akan saling klaim kebenaran atas informasi yang beredar. Apalagi, banyak politisi dan kaum intelektual justru ikut-ikutan mengklaim terjadi kecurangan dalam proses *quick count*. Padahal sebenarnya metode *quick count* sudah sesuai kaidah akademik yang dipertanggungjawabkan.

Itulah eksek dari demokrasi *post-truth* yang akan membuat setiap orang bisa mempublikasikan opini dan pendapat sendiri. Sehingga fakta apapun akan tenggelam oleh kerasnya suara pengirim pesan. Nahasnya lagi dalam demokrasi *post-truth* setiap orang akan selalu mengklaim pendapatnya yang paling benar. Sebab fakta-fakta yang ada kerap dimanipulasi dan dilepaskan dari konteksnya. Inilah dampak negatif dari demokrasi *post-truth* sekaligus paradoks pada era demokrasi digital yang kian hari kian warnai kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Jika terus mengalir, tentu fenomena demokrasi *post-truth* sangat berbahaya bagi upaya pendewasaan demokrasi.

Peran Media

Oleh sebab itu, upaya meredam demokrasi *post-truth* adalah dengan beberapa langkah antisipatif yakni; Pertama, mendorong peran media *mainstream* seperti harian *Kedaulatan Rakyat* untuk bisa menjadi garda terdepan dalam upaya menampilkan fakta dan data yang bisa dipertanggungjawabkan. Tanpa peran media *mainstream* tentulah tsunami hoaks dan gelombang kebenaran emosional akan sulit dibendung. Apalagi demokrasi *post-truth* seringkali ditandai de-

ngan kebimbangan media dan jurnalisme dalam menghadapi pernyataan-pernyataan bohong dari para politisi. Dikarenakan dalam demokrasi *post-truth* makin deras media menyiarkan berita-berita bohong soal kecurangan pemilu, maka justru akan membuat semakin populer kebohongan-kebohongannya tersebut masuk dalam akal sehat publik.

Kedua, peran serta para politisi sangat dinantikan untuk mempertegas upaya rekonsiliasi politik. Dengan membangun rekonsiliasi kebangsaan diantara elite politik dan para tokoh masyarakat bisa menjadi alternatif meredam fenomena demokrasi *post-truth*.

Terakhir, dengan kembali mempertegas literasi digital terutama menggunakan metode pembelajaran ungap fakta. Tujuannya agar setiap informasi yang beredar tidak serta merta ditelan oleh masyarakat. Tidak lupa, melalui momentum bulan suci Ramadan 1440 Hijriah, mari kita bersamasama menjaga jempol kita di media sosial, agar kebenaran emosional dapat digantikan dengan kebenaran objektif yang tentunya lebih bijak. Sebab kebenaran emosional tidak bisa hanya diilang dengan emosi tapi dengan mengedepankan data. □ - c

Peneliti LPPM Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) Yogyakarta.

Pojok KR

AS masih jadi tujuan utama ekspor DIY.
- Pengusaha dituntut jaga kualitas produk.

RUU Penghapusan Kekerasan Seksual masih kontroversial.
- Tanpa RUU pun kekerasan seksual dilarang.

Mahasiswa ditantang berani berwirausaha.
- Biar tak mengandalkan kiriman orangtua.

Berabe

SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) No. 127/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1986 tanggal 4 Desember 1990. Anggota SPS. ISSN: 0852-6486.

Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, Terbit Perdana: Tanggal 27 September 1945. Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).

Penerus: Dr H Soemadi M Wonohito SH (1985-2008) Penasihat: Drs HM Idham Samawi. Komisaris Utama: Prof Dr Inajati Adrisjianti. Direktur Utama: dr Gun Nugroho Samawi. Direktur Pemasaran: Fajar Kusumawardhani SE. Direktur Keuangan: Imam Satriadi SH. Direktur Umum: M Wirmon Samawi SE MIB. Direktur Produksi: Baskoro Jati Prabowo SSoS.

Alamat Percetakan: Jalan RayaYoga - Solo Km 11 Sleman Yogyakarta 55573, Telp (0274) - 496549 dan (0274) - 496449. Isi di luar tanggungjawab percetakan

Alamat Homepage: <http://www.kr.co.id> dan www.krjogja.com. Alamat e-mail: naskahkr@gmail.com. Radio: KR Radio 107.2 FM.

Bank: Bank BNI - Rek: 003.044.0854 Cabang Yogyakarta.

Perwakilan dan Biro:

Jakarta: Jalan Utan Kayu No. 104B, Jakarta Timur 13120, Telp (021) 8563602/Fax (021) 8500529. Kuasa Direksi: Ir Ita Indirani. Wakil Kepala Perwakilan: Hariyadi Tata Raharja.

Wartawan: H Imong Dewanto (Kepala Biro), H Ishaq Zubaedi Raqib, Syaifullah Hadmar, Muchlis Ibrahim, Rini Suryati, Ida Lumongga Ritonga.

Semarang: Jalan Lampersari No.62, Semarang, Telp (024) 8315792, 8448622. Kepala Perwakilan: Budiono Isman, Kepala Biro: Isdiyanto Isman SIP.

Surakarta: Jalan Letjen Sutuyo No 2 Rejosari RT 6 / RW 15 Kelurahan Gilingan Banjarsari Solo, Telp (0271) 2934878. Kepala Perwakilan: Dra Hermin Lestari, Kepala Biro: Qomarul Hadi.

Banyumas : Jalan Prof Moh Yamin No 5, Purwokerto, Telp (0281) 622244/Fax (0281) 621797. Kepala Perwakilan: Ach Pujiyanto Spd. Kepala Biro : Driyanto.

Klaten: Jalan Pandanaran Ruko No 2-3, Bendogantungan Klaten, Telp (0272) 322756. Kepala Perwakilan dan Kepala Biro : Sri Warsiti.

Magelang : Jalan Achmad Yani No 133, Magelang, Telp (0293) 363552, 362502. Kepala Perwakilan: Sumiyarsih, Kepala Biro : Drs M Thoha.

Purworejo : Jalan Veteran Blok A Kav. 6, Purworejo Plaza, Telp/Fax (0275) 321848. Kepala Perwakilan: Suprpto Spd, Kepala Biro: Gunarwan.

Kulonprogo : Jalan Veteran No 16, Wates, Telp (0274) 774738. Kepala Perwakilan : Suyatno, Kepala Biro : Asrul Sani.

Gunungkidul : Jalan Sri Tanjung No 4 Purwosari, Wonosari, Telp (0274) 393562, 394707. Kepala Perwakilan: Drs Guno Indarjo.

Kedaulatan Rakyat

Pemimpin Umum: dr Gun Nugroho Samawi. Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Drs H Octo Lampito MPd. Wakil Pemimpin Redaksi: Drs H Ahmad Luthfie MA. Ronny Sugiantoro SPd, SE, MM. Redaktur Pelaksana: Primaswolo Sudjono SP, Joko Budhiarto, Musahada. Manajer Produksi Redaksi: Ngabdul Wakid. Redaktur: Drs Sihono HT, Drs Widyo Suprayogi, Dra Esti Sulasarti MPd, Dra Hj Fadmi Susanti, Dra Prabdandari, Isnawan, Benny Kusumawan, Drs H Hudono SH, Drs Swasto Dayanto, Husein Effendi SSI, Hanik Atfiati, MN Hassan, Herry Sugito, Drs Jayadi K Kastari, Sutopo Sgh, M Arief Budiarto, Subchan Mustafa, Sulistyo Sutopo, Drs Hasto Sutadi, Muhammad Fauzi SSoS, Drs Mukti Haryadi, Retno Wulandari SSoS, H Chaidir, H M Sobirin, Linggar Sumukti, Agung Purwandono, Riyana Ekawati SIKom, Wahyu Priyanti SH, Ardi Wahdan. Fotografer: Effy Widjono Putro, Surya Adi Lesmana. Grafis : Joko Santoso SSn, Bagus Wijanarko. Sekretaris Redaksi: Dra Hj Supriyatin.

Pemimpin Perusahaan: Fajar Kusumawardhani SE. Kepala TU Langganan: Purwanto Hening Widodo BSc, Telp (0274) - 565685 (Hunting) Manajer Iklan : Agung Susilo SE, Telp (0274) - 565685 (Hunting) Fax: (0274) 555660. E-mail: iklan@kr.co.id, iklankr@yahoo.com, iklankrkry13@gmail.com.

Langganan per bulan termasuk 'Kedaulatan Rakyat Minggu'... Rp 65.000,00, Iklan Umum/Display... Rp 27.500,00/mm klm, Iklan Keluarga... Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Baris/Cilik (min. 3 baris, maks. 10 baris) Rp 12.000,00 /baris, Iklan Satu Kolom (min. 30 mm, maks. 100 mm) Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Khusus: Ukuran 1 klm x 45 mm ... Rp 210.000,00, (Wisuda lulus studi D1 s/d S1, Permikahan, Ulang Tahun) ... Iklan Warna: Full Colour Rp 51.000,00 /mm klm (min. 600 mm klm), Iklan Kuping (2 klm x 40 mm) 500% dari tarif. Iklan Halaman I: 300% dari tarif (min. 2 klm x 30 mm, maks. 2 klm x 150 mm). Iklan Halaman Terakhir: 200% dari tarif. Tarif iklan tersebut belum termasuk PPN 10%

Alamat Kantor Utama dan Redaksi: Jalan Margo Utomo (P Mangkubumi) 40 - 42 Yogyakarta, 55232. Fax (0274) - 563125, Telp (0274) - 565685 (Hunting)